



## Studi Tentang Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda

### *Study on Neighborhood-Based Rukun Tetangga Owned Enterprises (BUMRT) in Samarinda City*

**Jiuhardi**

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.  
Email: [jiuhardi@feb.unmul.ac.id](mailto:jiuhardi@feb.unmul.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMRT di Samarinda memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelaksanaan BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, dukungan dari pemerintah daerah, serta keberlanjutan program yang diselenggarakan. Faktor-faktor pendukung utama termasuk kebijakan yang proaktif dari pemerintah daerah dan tingginya semangat gotong royong masyarakat setempat. Meskipun demikian, peluang besar bagi BUMRT Berbasis Kelurahan terletak pada potensi ekonomi lokal yang belum sepenuhnya dioptimalkan, serta peningkatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat peran BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **Abstract**

*This research aims to examine the implementation of the duties of Village-Based Neighborhood-Owned Enterprises (BUMRT) in Samarinda City, as well as identifying supporting factors, challenges and opportunities faced in efforts to improve community welfare and contribute to the local economy. The results of the research show that BUMRT in Samarinda has a strategic role in empowering the community's economy and the implementation of the tasks of Village-Based BUMRT in Samarinda City is influenced by the level of community participation, support from the regional government, and the sustainability of the programs being held. The main supporting factors include proactive policies from the local government and the high spirit of mutual cooperation in the local community. However, the big opportunity for Village-Based BUMRT lies in local economic potential which has not been fully optimized, as well as increasing synergy with various stakeholders. It is hoped that these findings can be used as consideration for policy makers in strengthening the role of Village-Based BUMRT in Samarinda City as an important instrument in improving community welfare and supporting regional economic growth.*

*This is an open-access article under the CC-BY-SA license.*



Copyright © 2025 Jiuhardi.

#### **Article history**

*Received 2025-03-15  
Accepted 2025-04-20  
Published 2025-05-30*

#### **Kata kunci**

BUMRT;  
Pemberdayaan Masyarakat;  
Ekonomi Lokal;  
Usaha Berbasis RT.

#### **Keywords**

BUMRT;  
Community Empowerment;  
Local Economy;  
RT-Based Businesses.

## 1. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang wilayahnya terdiri atas beberapa pulau besar dan merupakan gabungan dari beberapa provinsi. Provinsi tersebut terdiri dari beberapa kabupaten/kota yang mempunyai pemerintah daerah dan diatur oleh Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan kesulitan untuk mengatur beberapa daerah yang begitu luas dan terbagi atas beberapa wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-Undang atau kebijakan yang mengatur tentang otonomi daerah di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan pada pemerintah kabupaten/kota untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten/kota tersebut.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melalui pembentukan badan usaha yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal.

Pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Maka dari itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh setiap individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, maka akan semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Dari pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga menjadikan perekonomian masyarakat yang mandiri.

Di Indonesia, konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah lama dikenal sebagai instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi pedesaan. Mengikuti jejak keberhasilan BUMDes, muncul gagasan untuk mengembangkan model serupa di tingkat yang lebih kecil, yaitu di tingkat Rukun Tetangga (RT), dengan tujuan memperkuat ekonomi masyarakat setempat melalui Badan Usaha Milik RT (BUMRT).

BUMRT adalah bentuk usaha ekonomi lokal yang dikelola oleh masyarakat di tingkat RT dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan warganya dan memperkuat perekonomian kelurahan. Keberadaan BUMRT diharapkan mampu mendukung perekonomian warga setempat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi.

Peran RT dalam program ini sangat menjadi prioritas untuk dapat membantu warganya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan dalam Pasal 14 disebutkan bahwa RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Begitupun dalam Pasal 15 RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi: pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya, pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat dan penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki dinamika ekonomi yang cukup pesat. Potensi ekonomi Samarinda sangat bergantung pada berbagai sektor seperti pertambangan, jasa, perdagangan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai inisiatif untuk memberdayakan ekonomi lokal telah berkembang, termasuk pembentukan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) berbasis kelurahan.

Pelaksanaan tugas BUMRT di Kota Samarinda tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pemerintah kota. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan BUMRT sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha, serta dukungan dari pemerintah lokal (Pambudi, 2020; Wulandari, 2021). Penelitian Pambudi (2020) menyebutkan bahwa pengelolaan BUMRT yang transparan dan akuntabel merupakan kunci

keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, faktor kelembagaan dan regulasi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan BUMRT di daerah perkotaan.

Studi dari Wulandari (2021) menekankan pentingnya adanya pendampingan teknis dan manajerial oleh pemerintah kota kepada BUMRT untuk memastikan mereka mampu menjalankan usaha yang berkelanjutan. Di Kota Samarinda, implementasi BUMRT juga perlu memperhatikan keberagaman potensi ekonomi di tiap kelurahan serta dinamika sosial masyarakat.

Pelaksanaan BUMRT di Kota Samarinda didukung oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi komitmen dan kapasitas pengurus BUMRT, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan RT. Beberapa literatur menyebutkan bahwa keberadaan kepemimpinan lokal yang kuat serta kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan program BUMRT (Setiawan, 2019).

Faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan BUMRT antara lain adalah kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada pengembangan usaha mikro dan kecil, serta dukungan finansial melalui program-program pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut studi dari Sudarmo (2020), kebijakan pemerintah dalam memfasilitasi akses modal bagi unit usaha kecil dan mikro menjadi faktor penting dalam pengembangan BUMRT. Selain itu, kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga keuangan juga turut membantu menggerakkan usaha yang dikelola oleh BUMRT.

Dalam pelaksanaan BUMRT, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas manajerial dan kewirausahaan sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan usaha yang optimal (Hermanto, 2018). Selain itu, tantangan dalam hal pemasaran dan distribusi produk menjadi kendala lain bagi BUMRT untuk mengembangkan usaha mereka. Kondisi pasar yang kompetitif dan terbatasnya jaringan pemasaran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan usaha BUMRT.

Namun demikian, BUMRT juga memiliki peluang besar untuk berkembang di masa depan. Peluang tersebut terutama datang dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut studi oleh Fauzan (2020), digitalisasi usaha dan adopsi teknologi juga memberikan peluang bagi BUMRT untuk memperluas pasar mereka.

## **2. Metode**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa yang diperlukan untuk mengukur maupun mengumpulkan data serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nawawi (1994:208) berpendapat bahwa objek dari penelitian kualitatif adalah manusia atau segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting).

Untuk memaparkan studi tentang BUMRT yang berbasis kelurahan di Kota Samarinda dalam upaya memandirikan masyarakat, maka penulis menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis berusaha mengetahui secara mendetail menggambarkan tentang mekanisme pelaksanaan BUMRT di Kota Samarinda.

### **2.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kelurahan yang dijadikan tempat pelaksanaan BUMRT Kota Samarinda Kalimantan Timur. Di lokasi tersebut terdapat banyak informan yang memenuhi karakteristik untuk dapat dijadikan narasumber agar peneliti mendapat informasi yang dibutuhkan dalam memenuhi penelitian yang dilakukan.

### **2.3. Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Faisal (1999:20), agar diperoleh informasi yang lebih terbukti, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan antara lain:

- 1) Subjek yang lama dan intensif dengan suatu kegiatan atau aktifitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
- 2) Subjek yang masih terkait secara penuh dan aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
- 3) Subjek yang mempunyai cukup banyak informasi, banyak waktu, dan kesempatan untuk dimintai keterangan.
- 4) Subjek yang berada atau tinggal pada sasaran yang mendapat perlakuan yang mengetahui kejadian tersebut.

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun kriteria dari informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini adalah:

- 1) Warga RT setempat yang memiliki informasi mengenai BUMRT di wilayah masing-masing.
- 2) Pengurus BUMRT yang berkecimpung dalam kegiatan BUMRT masing-masing.
- 3) Dinas-dinas terkait yang memiliki informasi mengenai BUMRT.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini, digunakan beberapa teknik, antara lain:

- 1) Wawancara Mendalam adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka maupun dengan tidak bertatap muka (melalui media telekomunikasi) antara orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai.
- 2) Studi Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya.

#### **2.5. Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subjek yang diteliti.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

#### **2.6. Teknik Analisa Data**

Nawawi (1994:189) mengemukakan bahwa tujuan analisa data adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk mengungkapkan:

- 1) Data apa yang masih perlu dicari.
- 2) Hipotesis apa yang perlu diuji.
- 3) Pertanyaan apa yang perlu dijawab.
- 4) Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.
- 5) Kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Dari definisi yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data adalah suatu usaha untuk menjelaskan, mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian agar mendapatkan informasi baru serta tidak terjadi kesalahan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Hasil Penelitian**

##### **3.1.1. Deskripsi BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda**

###### **1) Pengertian Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan**

Badan Usaha Milik RT (Berbasis Kelurahan) merupakan salah satu program unggulan dari Wali Kota Samarinda yang salah satu tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kelurahan.

Badan Usaha Milik Rukun Tetangga berbasis Kelurahan yang selanjutnya disingkat BUMRT Berbasis Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a) Kegiatan usaha dilingkungan Kelurahan yang berasal dari dan untuk masyarakat dalam lingkungan Kelurahan.
- b) Merupakan gabungan dari kelompok usaha di masing-masing RT dalam lingkungan Kelurahan dan atau juga dapat berupa gabungan dari BUMRT yang ada dalam lingkungan Kelurahan.

###### **2) Dasar Hukum Pembentukan BUMRT di Kota Samarinda**

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139).
- b) Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan.

##### **3.1.2. Maksud dan Tujuan Pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan**

Maksud pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan adalah :

- 1) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi yang ada di wilayah Kelurahan dengan melakukan kegiatan usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Kelurahan.
- 2) Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi lokal pengurus BUMRT Berbasis Kelurahan dan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- 3) Memperoleh laba bersih untuk peningkatan pendapatan asli BUMRT Berbasis Kelurahan dan mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan.
- 4) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di wilayah Kelurahan.

Tujuan pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan :

- 1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat yang mandiri untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha masyarakat di wilayah Kelurahan.
- 3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian.
- 4) Meningkatkan kreatifitas melalui transformasi digital dalam meningkatkan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat.
- 5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja.

##### **3.1.3. Jenis Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan**

Jenis Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan yaitu usaha industri, perdagangan, pengadaan barang dan jasa.

###### **1) Modal dan Sisa Hasil Usaha BUMRT Berbasis Kelurahan**

- a) Modal BUMRT Berbasis Kelurahan bersumber dari:
  - Swadaya Masyarakat

- Bantuan Pemerintah Daerah berupa sarana usaha
- Pihak Ketiga
- Hibah
- Pinjaman

b) ASET

Aset BUMRT Berbasis Kelurahan bersumber dari hasil usaha :

- Swadaya Masyarakat
- Bantuan Pemerintah Daerah berupa sarana usaha
- Pihak Ketiga
- Pinjaman
- Sumber lain yang sah
- Bantuan tidak mengikat termasuk hibah dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lainnya dan akan menjadi aset BUMRT Berbasis Kelurahan.

Perkembangan dan keberadaan Aset BUMRT Berbasis Kelurahan dilaporkan per semester dalam laporan keuangan pada Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

## 2) Pinjaman

- a) BUMRT Berbasis Kelurahan dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pinjaman dapat dilakukan pada lembaga keuangan dan sumber dana lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

## 3) Sisa Hasil Usaha

- a) Sisa hasil usaha atau laba bersih BUMRT berbasis Kelurahan merupakan pendapatan yang diperoleh dari usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya termasuk pajak dalam 1 (satu) tahun buku.
- b) Sisa hasil usaha atau laba bersih BUMRT berbasis Kelurahan dibagi atas :
  - Penambahan Modal Usaha
  - Pendapatan Asli BUMRT
  - Insentif, dan
  - Dana Sosial dan Peningkatan SDM
- c) Sebagaimana contoh pembagian SHU sebagai berikut:
  - Penambahan modal usaha 20 % (dua puluh per seratus).
  - Pendapatan BUMRT Berbasis Kelurahan minimal 30 % (tiga puluh per seratus).
  - Dana cadangan maksimal 10 % (sepuluh per seratus).
  - Penasihat maksimal 5 % (lima per seratus).
  - Pengawas maksimal 5 % (lima per seratus).
  - Pelaksana Operasional dan Pegawai maksimal 20 % (dua puluh per seratus).
  - Lain-lain sebesar 10 % (sepuluh per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk bantuan sosial kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.
- d) SHU sesuai dengan Anggaran Dasar yang dirumuskan dalam Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.
- e) Pembagian SHU dapat dirubah oleh Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan.

## 4) Tahapan Pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan

- a) Sosialisasi BUMRT berbasis Kelurahan kepada masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Samarinda.
- b) Pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan oleh Kecamatan di masing-masing Kelurahan. Kecamatan bertugas:
  - Membuat SK Tim Persiapan pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan di masing-masing Kelurahan.

- Penerbitan Surat Keputusan Camat tentang Kepengurusan dan Nama BUMRT Berbasis Kelurahan.

Kelurahan bertugas:

- Melaksanakan rapat pemetaan potensi dan jenis usaha di lingkungan RT (dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, notula rapat mengenai jenis usaha di masing-masing RT).
  - Sosialisasi pemetaan potensi dan pemilihan usaha pada masyarakat (dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, laporan).
  - Persiapan Pelaksanaan Musyawarah (dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, notula rapat).
- c) Pembuatan Surat Undangan Pelaksanaan Musyawarah yang ditanda tangani oleh Camat dan Lurah.
  - d) Musyawarah untuk pembentukan BUMRT Berbasis Kelurahan yang dikuatkan dengan berita acara yang berlokasi di Kelurahan dengan format terlampir. (dilengkapi dengan undangan, daftar hadir, dokumentasi, laporan hasil musyawarah).
  - e) Sosialisasi Draf Anggaran Dasar.

#### **5) BUMRT Berbasis Kelurahan Yang Sudah Terbentuk Sesuai Tahapan Pembentukan Bertugas:**

- a) Mengadakan musyawarah untuk penyusunan Anggaran Dasar (Format terlampir di Perwali No. 72 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan).
- b) Mendaftarkan perizinan usaha.

#### **6) Perangkat Organisasi BUMRT Berbasis Kelurahan :**

- a) Musyawarah BUMRT Berbasis Kelurahan
- b) Penasihat
- c) Pelaksana Operasional
- d) Pengawas
- e) Pendamping

### **3.2. Pembahasan**

#### **3.2.1. Pelaksanaan BUMRT Berbasis Kelurahan Di Kota Samarinda.**

Pada tahun 2022 teknis pembuatan BUMRT Berbasis Kelurahan mulai digagas oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 72 tahun 2022, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Rukun Tetangga Berbasis Kelurahan. Dimana target ada 10 unit usaha RT yang tersebar di 10 Kelurahan dari 10 Kecamatan sebagai *pilot project* dan dalam rangka mewujudkan hal tersebut dilakukan studi banding ke daerah yang sudah melaksanakan program serupa sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Selanjutnya pada tahun 2023 *launching* Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda dilakukan oleh Wali Kota Samarinda bertempat di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang. Dalam pidatonya Wali Kota Samarinda berharap dengan BUMRT ini akan membuka peluang wira usaha baru yang mendukung program penciptaan 10.000 wira usaha baru. Setelah itu mulai dilakukan pemantapan dan sosialisasi kepada Kecamatan dan Kelurahan tentang pelaksanaan program BUMRT Berbasis Kelurahan ini.

Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda dilakukan monitoring dan evaluasi lapangan di tahun 2024 ini. Adapun jumlah BUMRT Berbasis Kelurahan dari masing-masing Kecamatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah BUMRT masing-masing Kecamatan**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah BUMRT
1	Palaran	5	5
2	Sambutan	5	5
3	Samarinda Ulu	8	8
4	Loa Janan Ilir	5	5
5	Samarinda Utara	8	8
6	Samarinda Kota	5	5
7	Sungai Kunjang	7	7
8	Sungai Pinang	5	5
9	Samarinda Seberang	6	6
10	Samarinda Ilir	5	5
	<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>59</b>

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Samarinda, 2024.

Dari data diatas BUMRT Berbasis Kelurahan sudah terbentuk sebanyak 59 BUMRT yang terdapat di 10 Kecamatan. Program ini merupakan program prioritas Wali Kota dan harus tetap di kawal bukan hanya pmebentukannya saja tetapi juga bagaimana perkembangannya. Berapa yang berjalan dan berapa yang macet, kendalanya apa saja. Perangkat teknis terkait diharapkan bisa membina dan mengarahkan BUMRT Berbasis Kelurahan yang telah terbentuk dan manajemennya harus profesional.

### 3.2.2. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan BUMRT Di Kota Samarinda.

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda dapat dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Beberapa faktor penting tersebut antara lain:

- 1) Dukungan Pemerintah Lokal  
Keterlibatan pemerintah kota, terutama di tingkat kelurahan, sangat penting dalam menyediakan regulasi, kebijakan, serta dukungan administrasi dan pembinaan. Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis, pendampingan, serta fasilitas yang memudahkan proses pendirian dan operasional BUMRT.
- 2) Partisipasi Masyarakat  
Keterlibatan aktif masyarakat di tingkat RT dan kelurahan dalam pengelolaan BUMRT sangat menentukan. Partisipasi ini dapat berbentuk ide, tenaga, maupun modal. Dukungan dari komunitas sekitar, kepercayaan, dan kemauan untuk bekerja sama adalah elemen penting yang mendukung kesuksesan BUMRT.
- 3) Sumber Daya Manusia yang Kompeten  
Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUMRT menjadi kunci utama keberhasilannya. Pengelola yang memiliki kemampuan manajerial, keterampilan bisnis, serta integritas tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional BUMRT.
- 4) Potensi Ekonomi Lokal  
Setiap kelurahan memiliki potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan oleh BUMRT. Misalnya, potensi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, atau kerajinan lokal dapat dikembangkan menjadi usaha yang menguntungkan jika dikelola dengan baik.
- 5) Modal Awal dan Pendanaan  
Faktor pendanaan menjadi penentu penting dalam keberhasilan BUMRT. Sumber pendanaan bisa berasal dari iuran warga, hibah pemerintah, atau pinjaman. Ketersediaan modal yang cukup memungkinkan BUMRT memulai usahanya dengan baik dan dapat bertahan hingga mencapai kestabilan finansial.

6) Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Ketersediaan pasar untuk produk dan jasa yang dihasilkan BUMRT sangat penting. Akses yang baik ke pasar serta strategi pemasaran yang efektif, baik melalui pemasaran lokal maupun online, dapat memperluas jangkauan produk dan meningkatkan pendapatan BUMRT.

7) Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung

Adanya regulasi yang jelas dan mendukung pengembangan BUMRT akan menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif. Regulasi yang terkait dengan perizinan, perpajakan, serta aturan kerja sama antar-BUMRT atau dengan pihak swasta dapat mendorong perkembangan usaha ini.

8) Inovasi dan Adaptasi Teknologi

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi BUMRT. Inovasi dalam produk, layanan, serta adaptasi teknologi digital seperti e-commerce atau pemasaran melalui media sosial dapat membantu memperluas usaha dan meningkatkan daya saing.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.

### 3.2.3. Tantangan Dan Peluang Pelaksanaan BUMRT di Kota Samarinda.

Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUMRT) Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda, seperti di banyak daerah lainnya, menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian setempat. Berikut adalah beberapa tantangan dan peluang yang mungkin mereka hadapi:

#### 1) Tantangan

a) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Banyak anggota BUMRT mungkin tidak memiliki keterampilan manajerial atau teknis yang memadai, sehingga mempengaruhi efektivitas operasional.

b) Pendanaan dan Modal

Keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan atau modal awal bisa menghambat pengembangan usaha yang lebih besar atau inovatif.

c) Regulasi dan Birokrasi

Proses administratif dan regulasi yang rumit bisa menghambat kegiatan BUMRT, terutama dalam hal perizinan dan pelaporan.

d) Pemasaran dan Persaingan

Kesulitan dalam memasarkan produk atau jasa serta bersaing dengan usaha lain bisa menjadi tantangan, terutama jika produk atau jasa yang ditawarkan tidak memiliki keunggulan kompetitif yang jelas.

e) Infrastruktur yang Kurang Memadai

Keterbatasan infrastruktur seperti transportasi atau fasilitas penyimpanan bisa mempengaruhi operasi dan distribusi.

#### 2) Peluang

a) Pemberdayaan Komunitas

BUMRT dapat memanfaatkan kekuatan komunitas lokal untuk mendukung dan mempromosikan usaha mereka, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

b) Inovasi Produk dan Jasa

Dengan memanfaatkan kebutuhan lokal dan kekuatan unik komunitas, BUMRT dapat mengembangkan produk atau jasa yang sesuai dengan permintaan pasar setempat.

c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Bekerja sama dengan pemerintah lokal, LSM, atau sektor swasta dapat membuka peluang baru untuk pendanaan, pelatihan, dan dukungan teknis.

d) Penggunaan Teknologi

Memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran, penjualan, dan manajemen dapat meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar BUMRT.

- e) Program Pendukung Pemerintah  
Memanfaatkan berbagai program dan insentif pemerintah untuk BUMRT bisa membantu dalam pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas.
- f) Kesadaran Lingkungan dan Sosial  
BUMRT dapat memanfaatkan tren peningkatan kesadaran lingkungan dan sosial untuk menawarkan produk atau jasa yang lebih ramah lingkungan atau berfokus pada keberlanjutan.

Dengan mengidentifikasi dan menangani tantangan tersebut sambil memanfaatkan peluang yang ada, BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda bisa berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) BUMRT Berbasis Kelurahan di Kota Samarinda menjalankan berbagai fungsi ekonomi, seperti penyediaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan BUMRT ini melibatkan berbagai level pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Umumnya, BUMRT dapat menjalankan fungsinya dengan baik berkat adanya dukungan dari kelurahan dan partisipasi aktif masyarakat. Namun, efektivitas operasional sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan manajemen yang kurang optimal.
- 2) Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan BUMRT Berbasis Kelurahan
  - a) Dukungan Pemerintah: Bantuan dari pemerintah daerah berupa kebijakan, pelatihan, dan dukungan finansial sangat membantu kelancaran operasional BUMRT.
  - b) Partisipasi Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan BUMRT merupakan faktor penting yang mendukung kesuksesan usaha ini.
  - c) Sumber Daya Manusia: Keterampilan dan komitmen pengurus BUMRT, serta kemampuan mereka dalam mengelola usaha, berperan besar dalam menentukan keberhasilan operasional.
  - d) Infrastruktur dan Aksesibilitas: Ketersediaan infrastruktur yang memadai serta aksesibilitas ke pasar dan bahan baku mempermudah pelaksanaan tugas BUMRT.
- 3) Tantangan yang Dihadapi BUMRT Berbasis Kelurahan
  - a) Keterbatasan Modal: Banyak BUMRT menghadapi kendala finansial yang membatasi kapasitas usaha mereka untuk berkembang dan meningkatkan layanan.
  - b) Manajemen dan Administrasi: Kurangnya keterampilan manajerial dan administrasi dapat menghambat efektivitas operasional dan pengelolaan keuangan.
  - c) Persaingan Pasar: Kompetisi dengan usaha swasta dan BUMN bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal harga dan kualitas produk/jasa.
  - d) Keterbatasan Infrastruktur: Masih ada beberapa area di Kota Samarinda yang kekurangan infrastruktur memadai yang mendukung kegiatan usaha BUMRT.
- 4) Peluang yang Dapat Dimanfaatkan
  - a) Pengembangan Produk dan Jasa: BUMRT dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan produk dan jasa baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - b) Kolaborasi dan Kemitraan: Kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga keuangan, perusahaan, atau pemerintah dapat membuka peluang baru untuk pengembangan usaha.
  - c) Peningkatan Kapasitas: Pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk pengurus BUMRT serta masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan BUMRT.

### Daftar Pustaka

- Arikunto S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI. Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta.
- BN. Marbun. 1983. *DPR Daerah: Pertumbuhan, Masalah & Masa depannya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Irawan. 1982. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Kadariah. 1994. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Miles, Mathew B. dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta : UIP.
- Sumaryadi,I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan dalam Pasal 14.